

RUTAN KELAS IIB WATES

## Deklarasi Zero 'Halinar'

WATES (KR) - Dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat disebabkan oleh handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates melaksanakan deklarasi Zero handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar), di Aula bawah Rutan Wates, Selasa (9/5).

Kegiatan dipimpin Kepala Rutan bersama jajaran pejabat struktural dan petugas. Deklarasi diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Zero Halinar di banner yang sudah di sediakan sebagai bentuk wujud mendukung Program Zero Halinar.

Kepala Rutan Kelas IIB Wates, Erik Murdiyanto menjelaskan, Handphone, Pungli dan Narkoba menjadi hal serius yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Amanah Direktur Jendral Pemasyarakatan, Irjen Pol Drs Reynhard SP Silitonga SH MSi.

"Halinar menjadi hal serius yang harus diperhatikan. Deklarasi hari ini ja-



KR-Widiastuti

### Penandatanganan deklarasi.

ngan hanya menjadi acara seremonial untuk didokumentasikan, namun harus benar-benar dilaksanakan dengan cermat dan penuh tanggungjawab. Tidak ada kata ampun bagi petugas yang melanggar deklarasi. Bangun komitmen bersama ciptakan Rutan Kelas IIB Wates Zero Halinar," tandas Erik.

Kepala Pemasyarakatan Rutan, Didik Wahyu Hidayat menambahkan, sebelum pelaksanaan Zero Halinar, di Rutan Wates sudah dilaksanakan langkah strategis diantaranya adalah pelaksanaan Operasi Penggeledahan Kamar dan pengecekan urine bagi Warga

Binaan. "Beberapa hari lalu, sudah dilaksanakan penggeledahan kamar dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine bagi warga binaan. Alhamdulillah hasilnya Rutan Wates Zero Halinar," terang Didik.

Kegiatan deklarasi Zero Halinar ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan nomor surat : PAS-PK.08.05-714 tentang pelaksanaan langkah progresif sebagai tindak lanjut atas maraknya pengaduan terhadap Lapas/Rutan terkait peredaran narkoba, penipuan online, pungli, dan lain-lain. (Wid)-f

PEMKAB USULKAN ANGGARAN PUSAT

## Perbaikan Jalan Butuh Dana Rp 600 Miliar

WONOSARI (KR) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul mendata ruas jalan kabupaten yang rusak sepanjang 370 kilometer dan membutuhkan biaya perbaikan sekitar Rp 600 miliar. Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan panjang ruas jalan di Gunungkidul mencapai 1.136 kilometer. "Untuk ruas jalan yang rusak berat sepanjang 237,96 kilometer," katanya, Selasa (9/5).

Dari hasil pendataan yang dilakukan, saat ini untuk ruas jalan yang baik sepanjang 513,11 kilometer, sedang 253,41 kilometer. Untuk jalan yang mengalami kerusakan ringan sepanjang 132,16 kilometer.

Upaya perbaikan terus dilakukan setiap tahun meskipun karena kemampuan

keuangan daerah yang masih terbatas, maka perbaikan dilakukan secara bertahap. Saat ini ada beberapa ruas yang diperbaiki diantaranya jalur menuju obwis di Ngalenggeran, Patuk dan Kalisuci Kapanewon Semanu diperbaiki dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp15 miliar, i inibunya.

Untuk perbaikan jalan tersebut tidak hanya menggunakan DAK tetapi juga melalui Dana Alokasi Umum. Total, anggaran perbaikan di tahun ini mencapai Rp 69,6 miliar tersebar di sejumlah ruas dan ini termasuk untuk Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dipergunakan memperbaiki jalan yang rusak. "Sudah ada kajian terkait dengan upaya perbaikan jalan yang rusak. diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 600 miliar," ujarnya. (Bmp)-f

PEMOHON DISPENSASI NIKAH MENINGKAT

## Selama 4 Bulan 52 Pengajuan

WONOSARI (KR) - Pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) Wonosari Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi. Selama Januari hingga akhir April 2023 tercatat sebanyak 52 pemohon mengajukan dispensasi nikah dan salah satu faktor pendorong pengajuan dispensasi nikah terbanyak akibat kehamilan diluar pernikahan.

Panitera Muda PA Wonosari, Khoiril Basyar, mengatakan tren pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya masih fluktuatif. Pada tahun 2021 lalu, tercatat dispensasi nikah yang diajukan ke PA sebanyak 218 pengajuan. Kemudian tahun 2022 jumlah dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan dibawah umur mengalami penurunan yakni sebanyak 171 pengajuan. "Tahun ini baru berjalan sekitar empat bulan sudah ada 52 pengajuan dispensasi nikah. Dimungkinkan jumlah ini masih terus bertambah hingga akhir tahun mendatang," katanya Rabu (10/5).

Jika dibandingkan dengan periode bulan yang sama pada tahun 2022, tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 6,12 persen. Sementara adanya berbagai faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan dispensasi nikah didominasi adanya kasus kehamilan diluar nikah yang dialami oleh remaja. Berdasarkan data yang ada, ratusan dispensasi nikah setiap tahunnya diajukan ke PA Wonosari pengajuan tersebut tidak serta-merta akan dikabulkan oleh hakim. Pemberian dispensasi nikah merupakan keputusan hakim, secara

persyaratan merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 5 tahun 2019 itu harus ada surat keterangan dari dokter dan juga rekomendasi dari pihak perlindungan perempuan dan anak. "Ketentuan ini untuk menunjukkan apakah anak itu capak berkeluarga atau tidak, i inibuhnya.

Selain didominasi hamil diluar nikah, juga ada yang sudah berhubungan suami istri, ada yang khawatir berbuat dosa kemudian dijodohkan. Jika dibandingkan sebelum Perma nomor 5 tahun 2019 ada, angka pengajuan dispensasi nikah di Gunungkidul terbilang sedikit. Hal itu karena dalam Perma tersebut mengubah batas umur perempuan untuk menikah yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun. "Sebelum ada Perma setiap tahun hanya sekitar 40 pengajuan, setelah ada Perma karena merubah batas umur ada ratusan pengajuan setiap tahun," pungkasnya. (Bmp)-f

'OBSIKU' PODCAST KULONPROGO

## Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo terus berupaya maksimal meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Publik (SPM) di berbagai bidang dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati setempat Tri Saktiyana MSi pada Obrolan Seputar Solusi dan Inovasi Kulonprogo 'Obsiku' Podcast Kulonprogo di Media Center, Dinas Kominfo Kulonprogo, Selasa (9/5).

Dalam kesempatan tersebut Tri Saktiyana membahas tema pelayanan publik bersama Kapolres Kulonprogo AKBP Nunuk Setiyowati SIK MH dan dipandu moderator Artika Amelia.



KR-Asrul Sani

### Pj Bupati Tri Saktiyana dan Kapolres Kulonprogo AKBP Nunuk Setiyowati SIK MH salam presisi.

Tri Saktiyana mengatakan Pemkab Kulonprogo banyak menerima penghargaan dari lembaga dan kementerian.

Terkait baiknya pemenuhan SPM, tidak serta merta menjadi titik puncak dari pelayanan publik, tapi Pemkab akan terus meningkatkan pelay-

anan masyarakat secara cepat dan mudah serta berinovasi untuk efisiensi dan efektifitas layanan publik salah satunya melalui digitalisasi pelayanan publik.

Dalam tata kelola pemerintahan modern saat ini, proses-proses pemberdayaan dirasa sangat pen-

ting. Dengan turut sertanya kontribusi masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik mampu mengurangi beban kebutuhan sumber daya pemerintah.

Sedangkan Kapolres Kulonprogo AKBP Nunuk Setiyowati mengatakan, pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati dan terus menjalin kolaborasi bersama Pemkab dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kulonprogo.

"Terkait tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya selalu menekankan pada anggota untuk selalu bekerja dengan hati," kata Nunuk. (Rul)-f

## Apresiasi Respons Cepat Penanggulangan Bencana

WONOSARI (KR) - Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Kebencanaan mengapresiasi respon cepat penanggulangan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul. Kunker masa reses ini dipimpin Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayanti diterima Bupati Gunungkidul H Sunaryanta di Gedung Taman Budaya Gunungkidul (TBG). "Apresiasi kami sampaikan selain respon cepat penanganan bencana juga pengadaan air bersih bagi warga terdampak bencana," katanya, Rabu (9/5).

Selain penanganan bencana alam pihaknya juga mengapresiasi tentang pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Gunungkidul. Respon



KR-Bambang Purwanto

### Anggota Komisi VIII DPR RI serahkan bantuan sosial di Gunungkidul.

yang baik dan cepat terhadap BNPB perlu untuk terus ditingkatkan sehingga Komisi VIII DPR RI juga bisa bertindak cepat untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi persoalan kebencanaan terutama dalam hal mitigasi. Selain itu pihaknya juga mengapresiasi kepada Kemensos Gunungkidul dalam menangani bantuan berupa Rumah Sederhana Ter-

padu dan bantuan sepeda motor dari Mensos bagi terdampak bencana di Semin. Beberapa waktu lalu juga mengunjungi warga terdampak bencana dan memberikan bantuan berupa sepeda motor dari Mensos bagi warga terdampak longsor. "Penanganan cepat khususnya menyangkut bencana alam harus dilakukan," ujarnya. (Bmp)-f

KULONPROGO TERTINGGI DI DIY

## Penurunan Angka Kemiskinan

SAMIGALUH (KR) - Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana MSi mengklaim prosentase penurunan angka kemiskinan di Kulonprogo tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemkab setempat terus berupaya maksimal mengatasi kemiskinan maupun stunting. Hal tersebut da-

pat dilihat dari penurunan angka kemiskinan dari 18 persen di tahun 2022 menjadi 16 persen di 2023.

Pernyataan itu disampaikan Tri Saktiyana saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kapanewon Samigaluh, Senin (8/5).

"Satu tahun turun dua persen, ini prosentase pe-

nurunnya paling tinggi di DIY, tapi tetap tidak mengembirakan bagi kami karena masih tinggi dibanding nasional. Sehingga kami terus berupaya menanggulangi kemiskinan di Kulonprogo," tegasnya.

Selain penanganan kemiskinan ungkapnya Pemkab juga terus melaksanakan program-program penanganan stunting. Di kabupaten ini tercatat 1.934 kasus stunting.

Selain dengan program-program dalam bentuk bantuan, sosialisasi, pendampingan dan sejenisnya, Pemkab juga mengupayakan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting yang dirasa lebih optimal. (Rul)-f



KR-Asrul Sani

### Pj Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana (tengah) menerima secara simbolis bantuan kebencanaan dari Kemensos.

Kedaulatan Rakyat  
EPAPER  
www.kr.co.id



Berlangganan  
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.